



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.976, 2019

KEMENHUB. Organisasi. Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 56 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 40 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pelayanan, keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada bandar udara yang belum diusahakan komersial serta meningkatkan profesionalisme aparatur dan optimalisasi pemanfaatan dan pemenuhan jabatan fungsional yang berkembang di bidang Transportasi Udara, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
- b. bahwa untuk menata organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kementerian

Perhubungan telah mendapatkan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/480/M.KT.01/2019 tanggal 31 Mei 2019 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 262);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 40 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 39 dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan:

- a. Nomor PM 83 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 688);
 - b. Nomor PM 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1489); dan
 - c. Nomor PM 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 262),
- diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Unit Penyelenggara Bandar Udara berjumlah 158 (seratus lima puluh delapan) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yang terdiri atas:

- a. 2 (dua) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Utama;
 - b. 12 (dua belas) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I;
 - c. 23 (dua puluh tiga) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II; dan
 - d. 121 (seratus dua puluh satu) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III.
- (2) Satpel BU berjumlah 18 (delapan belas).
- (3) Daftar Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Satpel BU yang memuat nama bandara, lokasi, dan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 56 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR PM 40 TAHUN
2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA

DAFTAR KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA

Provinsi Aceh				
	Cut Nyak Dhien Nagan Raya	Nagan Raya	II	
	Maimun Saleh	Sabang	III	
	Lasikin	Sinabang	III	
	Teuku Cut Ali	Tapak Tuan	III	
	Rembele	Takengon	III	
	Blangkajeren	Gayo Lues	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Rembele
	Alas Leuser	Kutacane	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Rembele
	Malikussaleh	Aceh Utara	III	
Provinsi Sumatera Utara				
	Binaka	Gunung Sitoli	II	
	Lasondre	Pulau-pulau Batu	III	
	FL Tobing	Sibolga	III	Pinangsori (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
	Sibisa	Parapat	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU FL Tobing
	Aek Godang	Padang Sidempuan	III	
Provinsi Sumatera Barat				
	Rokot	Sipora	III	
Provinsi Kepulauan Riau				
	Dabo	Singkep	III	
	Letung	Anambas	III	
	Raja Haji Abdullah	Karimun	III	Sei Bati (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
	Ranai	Natuna	III	
Provinsi Riau				
	Japura	Rengat	III	
	Pasir Pangaraian	Pasir Pangaraian	III	

Provinsi Jambi				
	Depati Parbo	Kerinci	III	
	Muara Bungo	Rimbo Bujang	III	
Provinsi Bengkulu				
	Fatmawati Soekarno	Bengkulu	I	Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
	Muko-muko	Muko-muko	III	
	Enggano	Enggano	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Muko-muko
	Silampari	Lubuk Linggau	III	
	Muhammad Taufik Kiemas	Pesisir Barat, Lampung	Satpel BU	Pekonserai (nama bandar udara lama berdasar PM 40/2014), Pelayanan Kantor UPBU Silampari
Provinsi Bangka Belitung				
	H. As. Hanandjoedin	Tanjung Pandan	I	Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Provinsi Lampung				
	Radin Inten II	Lampung Selatan	I	Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Provinsi Jawa Barat				
	Cakrabhuana	Cirebon	III	Penggung (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
Provinsi Jawa Tengah				
	Tunggul Wulung	Cilacap	III	
	Dewa Daru	Karimun Jawa	III	
Provinsi Jawa Timur				
	Trunojoyo	Sumenep	III	
	Harun Thoir	Gresik	III	Bawean (nama bandara lama berdasarkan PM 40 tahun 2004)
Provinsi Nusa Tenggara Barat				
	Sultan Muhammad Salahuddin	Bima	II	
	Sultan Muhammad Kaharuddin	Sumbawa	III	Brangbiji (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
Provinsi Nusa Tenggara Timur				
	Fransiskus Xaverius Seda	Maumere	II	Wai Oti (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
	Umbu Mehang Kunda	Waingapu	II	Mau Hau (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)

	Komodo	Labuhan Bajo	II	
	H. Hasan Aroeboesman	Ende	II	
	Frans Sales Lega	Ruteng	III	Satar Tacik (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
	Tambolaka	Waikabubak	II	
	A.A Bere Tallo	Atambua	III	Haliwen (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
	Mali	Alor	III	
	Kabir	Alor	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Mali
	Gewayantana	Larantuka	III	
	David Constantijn Saudale	Rote Ndao	III	Lekunik (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
	Tardamu	Sabu	III	
	Soa	Bajawa	III	
	Wonopito	Lewoleba	III	
Provinsi Kalimantan Barat				
	Rahadi Oesman	Ketapang	II	
	Tebelian	Sintang	II	Relokasi dari UPBU Susilo - Sintang
	Pangsuma	Putussibau	II	
	Nangapinoh	Nangapinoh	III	
Provinsi Kalimantan Tengah				
	Tjilik Riwut	Palangkaraya	I	
	Iskandar	Pangkalan Bun	II	
	H. Asan	Sampit	II	
	Sunggu	Buntok	III	
	Beringin	Muara Teweh	III	
	Kuala Pembuang	Kotawaringin Timur	III	
	Tumbang Samba	Tumbang Samba	III	
	Kuala Kurun	Kuala Kurun	III	
Provinsi Kalimantan Selatan				
	Gusti Syamsir Alam	Kotabaru	II	Stagen (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
Provinsi Kalimantan Timur				
	Aji Pangeran Tumenggung Pranoto	Samarinda	I	Relokasi dari UPBU Temindung - Samarinda
	Melak	Sendawar	III	
	Kalimarau	Tanjung Redep	I	Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
	Maratua	Berau	III	
	Datah Dawai	Datah Dawai	III	

Provinsi Kalimantan Utara				
	Juwata	Tarakan	I Utama	Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
	Seluwing	Malinau	III	
	Nunukan	Nunukan	III	
	Yuvai Semaring	Long Bawan	III	
	Tanjung Harapan	Tanjung Selor	III	
	Long Apung	Long Apung	III	
Provinsi Sulawesi Utara				
	Naha	Tahuna	III	
	Melongguane	Sangihe Talaud	III	
	Miansas	Kepulauan Talaud	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Melongguane
Provinsi Gorontalo				
	Djalaluddin	Gorontalo	I	Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah				
	Mutiara Sis-Al Jufri	Palu	I	Mutiara (nama bandara sesuai KM 7/2008), Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
	Pogogul	Buol	III	
	Syukur Aminudin Amir	Luwuk	II	Bubung (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
	Tanjung Api	Ampana	III	Tojo Una Una (nama bandar udara lama berdasarkan PM 8/2018)
	Sultan Bantilan	Tolo-toli	III	Lalos (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
	Kasiguncu	Poso	II	
	Morowali	Morowali	III	
Provinsi Sulawesi Barat				
	Tampa Padang	Mamuju	II	
	Sumarorong	Mamasa	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Tampa Padang
Provinsi Sulawesi Selatan				
	Pongtiku	Makale	III	
	H. Aroepala	Pulau Selayar	III	
	Andi Jemma	Masamba	III	
	Bone	Bone	III	
	Seko	Seko	III	

	Rampi	Rampi	III	
	Lagaligo	Luwu	III	Bua (nama bandar udara lama berdasarkan PM 8 tahun 2018)
Provinsi Sulawesi Tenggara				
	Haluoleo	Kendari	I	Wolter Monginsidi (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
	Matahora	Wakatobi	III	
	Sangia Ni Bandera	Kolaka	III	
	Beto Ambari	Bau-bau	III	
	Sugimanuru	Muna	III	
Provinsi Maluku Utara				
	Sultan Babullah	Ternate	II	
	Gebe	Pulau Gebe	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Sultan Babullah
	Emalamo	Sanana	III	
	Buli	Maba	III	
	Kuabang	Kao	III	
	Gamar Malamo	Galela	III	
	Oesman Sadik	Labuha	III	
	Pitu	Morotai	III	
Provinsi Maluku				
	Karel Sadsuitubun	Langgur	II	Ibra (nama bandar udara lama berdasar PM 40/2014)
	John Becker	Pulau Kisar	III	
	Moa	Maluku Tenggara	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU John Becker
	Larat	Pulau Larat	III	
	Dobo	Pulau Aru	III	
	Mathilda Batlayeri	Maluku Tenggara Barat	III	Olilit (nama bandar udara lama berdasar KM 7/2008)
	Bandaneira	Pulau Banda	III	
	Kuffar	Seram Bagian Timur	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Bandaneira
	Namlea	Pulau Buru	III	
	Namrole	Pulau Buru	III	
	Amahai	Pulau Seram	III	
	Wahai	Pulau Seram	III	
Provinsi Papua				
	Sentani	Jayapura	I Utama	Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
	Dabra	Mamberamo Raya	III	
	Mopah	Merauke	I	
	Senggo	Mappi	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Mopah
	Kamur	Asmat	III	

	Kimam	Merauke	III	
	Bomakia	Boven Digoel	III	
	Senggeh	Keerom	III	
	Wamena	Jayawijaya	I	
	Elelim	Yalimo	III	
	Nabire	Nabire	II	Bandar Udara Nabire di Nabire
	Bilorai	Intan Jaya	III	
	Enarotali	Paniai	III	
	Waghete	Deiyai	III	
	Mararena	Sarmi	III	
	Tanah Merah	Boven Digoel	III	
	Manggalum	Boven Digoel	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Tanah Merah
	Korowai Batu	Boven Digoel	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Tanah Merah
	Mulia	Puncak Jaya	III	
	Stefanus Rumbewas	Kepulauan Yapen	III	
	Oksibil	Pegunungan Bintang	III	
	Kiwirok	Pegunungan Bintang	III	
	Moanamani	Nabire	III	
	Mindiptanah	Boven Digoel	III	
	Kepi	Mappi	III	
	Kokonao	Mimika	III	
	Akimuga	Mimika	III	
	Mozes Kilangin	Mimika	II	
	Bokondini	Jayawijaya	III	
	Okaba	Merauke	III	
	Numfoor	Biak Numfoor	III	
	Illaga	Puncak	III	
	Sinak	Puncak Jaya	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Illaga
	Illu	Puncak Jaya	III	
	Tiom	Lanny Jaya	III	
	Ewer	Asmat	III	
	Batom	Pegunungan Bintang	III	
	Bade	Mappi	III	
	Karubaga	Tolikara	III	
	Nop Goliat Dekai	Yahukimo	II	
	Sobaham	Yahukimo	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Nop Goliat Dekai
Provinsi Papua Barat				
	Rendani	Manokwari	II	
	Domine Eduard Osok	Sorong	I	